

RESPON UNI EROPA TERHADAP *BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) SUMMIT*

2019



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh
gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh:

SAYYIDAH NISA'A ANSHARY

E061171521

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : RESPON UNI EROPA TERHADAP *BELT AND ROAD*
INITIATIVE (BRI) SUMMIT 2019

N A M A : SAYYIDAH NISA'A ANSHARY

N I M : E061171521

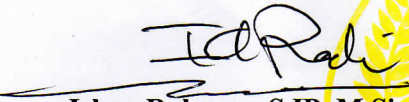
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 12 Juli 2021

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : RESPON UNI EROPA TERHADAP *BELT AND ROAD*
INITIATIVE (BRI) SUMMIT 2019

N A M A : SAYYIDAH NISA'A ANSHARY

N I M : E061171521

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 12 Juli 2021.

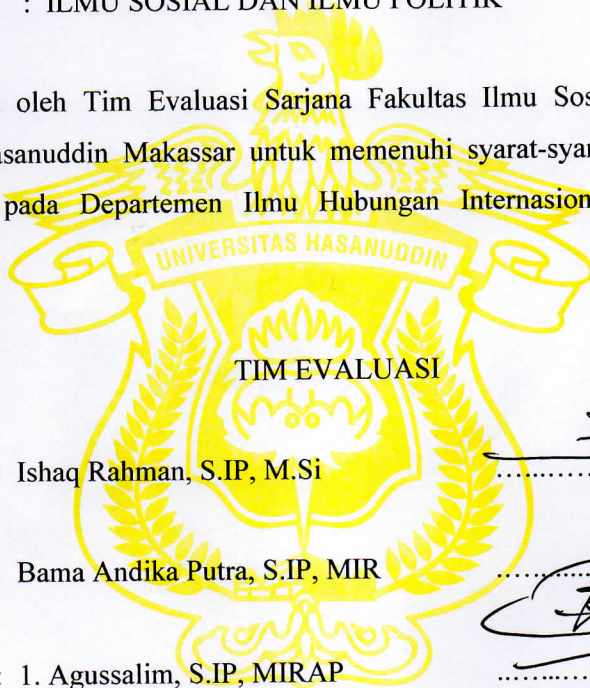
Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si



Ishaq
.....
Bama
.....
Agussalim
.....
Aswin
.....
Pusparida
.....

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sayyidah Nisa'a Anshary
NIM : E 061171521
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

RESPON UNI EROPA TERHADAP BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) SUMMIT 2019

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi/tesis/disertasi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Juli 2021

Yang menyatakan,



(Sayyidah Nisa'a Anshary)

ABSTRAK

Sayyidah Nisa'a Anshary, E 061 171 521. “Respon Uni Eropa terhadap Belt and Road Initiative (BRI) Summit 2019”, dibawah bimbingan **Ishaq Rahman** sebagai Pembimbing I dan **Sawing Baharuddin** sebagai pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respon dan hasil dari BRI terhadap Uni Eropa pasca Belt and Road Initiative (BRI) Summit 2019. Di dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif, dengan jenis data sekunder dan metode pengumpulan data telaah Pustaka melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan respon dan hasil dari BRI terhadap Uni Eropa yang dapat berasal dari buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, surat kabar, maupun artikel. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan teknik analisis data kualitatif dan metode penulisan deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kemitraan strategis yang terjalin antar negara dapat menghasilkan keuntungan bagi negara yang berpartisipasi. Dengan adanya kerja sama yang dibangun oleh Tiongkok dan Uni Eropa telah menghasilkan beberapa proyek. Setelah EU-China Summit dilaksanakan, kedua belah pihak telah sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensifnya dalam kerja sama dengan BRI.

Kata Kunci: Uni Eropa, BRI, Kemitraan Strategis

ABSTRACT

*Sayyidah Nisa 'a Anshary, E 061 171 1521, "European Union response towards Belt and Road Initiative (BRI) Summit 2019", under the guidance of Mr. **Ishaq Rahman** as Supervisor I and Mr. **Aswin Baharuddin** as Supervisor II, at the Departement of Relations International, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

This Study aims to explain how European Union response and results of BRI to European Union towards Belt and Road Initiative (BRI) Summit 2019. This study uses a qualitative type of research, with secondary data and data collection methods through the literature review through various literatures related to the response and the results of BRI to the European Union which can come from books, journals, documents, papers, reports, newspapers, and article. Furthermore, in analyzing the data, writers used qualitative data analysis techniques and deductive writing methods.

The results of this study indicate that strategic partnerships between countries can generate benefits for participating countries. With the cooperation built by China and the European Union, several projects have been produced. After EU-China Summit been held in 2019, both parties agreed to enhance a comprehensive strategic partnership in cooperation with BRI.

Keywords: European Union, BRI, Strategic Partnership

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv	
ABSTRAK	v	
ABSTRACT	vi	
DAFTAR ISI	vii	
DAFTAR TABEL	ix	
DAFTAR BAGAN	x	
DAFTAR GAMBAR	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan & Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian	6
	D. Kerangka Konseptual.....	7
	E. Metode Penelitian	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	15
	A. Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional	15
	B. Kemitraan Strategis Negara & Organisasi Internasional	23
	C. Penelitian Terkait	33
BAB III	GAMBARAN UMUM	35
	A. Dinamika Hubungan Tiongkok dan Eropa	35
	B. Sejarah dibentuknya <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI).....	44
	C. European Union-China Summit	57
BAB IV	PEMBAHASAN	64
	A. Respon Uni Eropa terhadap <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) Summit 2019	64
	B. Hasil dari <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) terhadap Uni Eropa pasca BRI Summit 2019	76
BAB V	KESIMPULAN & SARAN	88
	A. Kesimpulan	88

B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	34
------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	8
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Infografis dari Belt and Road Initiative (BRI).....	50
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uni Eropa merupakan suatu organisasi supranasional yang beranggotakan 27 negara Eropa yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia (Union, 2020). Hubungan kerja sama bilateral antara Tiongkok dan Uni Eropa telah terjalin sejak tahun 1980, dimana kerja sama tersebut termasuk ke dalam segala bidang seperti pembangunan, perdagangan, investasi, teknologi, energi, serta pertukaran budaya dan akademis (Dai, 2006).

Pada tahun 1996, Uni Eropa mengajukan “ *a New Strategy of the EU on China*”, yang selanjutnya akan melaksanakan kerja sama dan pertukaran rinci di bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan bantuan pembangunan. Di tahun 2001, Uni Eropa membuat dokumen resmi yang menetapkan tujuan konkrit jangka pendek dan menengah dalam hubungannya dengan Tiongkok. Dalam dokumen tersebut, Uni Eropa secara eksplisit menekankan perlunya dan pentingnya melibatkan Tiongkok dalam memperkuat pemerintahan global. Uni Eropa turut berjanji untuk mendukung Tiongkok menjadi masyarakat yang lebih terbuka dan memfasilitasi integrasi lebih lanjut ekonomi Tiongkok dalam sistem ekonomi dunia. (Comission Working Document, 2020).

Hingga saat ini, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok sedangkan Tiongkok juga menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Uni Eropa, setelah Amerika Serikat. Beberapa perusahaan di Eropa turut menyimpan kepercayaan yang besar kepada pasar Tiongkok karena para pebisnis Tiongkok memperhatikan Eropa atas bisnis di wilayah perdagangan Uni Eropa (Fiba, 2020).

Hubungan Tiongkok dengan Eropa telah berkembang pesat selama tiga dekade terakhir, dengan kekuatan dua benua dengan berbagi kepentingan dan prioritas strategis yang sama, termasuk keinginan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil. Pentingnya hubungan ini terlihat dalam berbagai bidang mulai dari perdagangan internasional hingga kerja sama politik di lembaga multilateral. (Taneja, 2010).

Uni Eropa melihat Tiongkok sebagai peluang yang dapat menguntungkan bagi negara anggotanya, karena dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat dan posisinya yang strategis. Sedangkan bagi Tiongkok sendiri, ia melihat bahwa dengan menjalin kerjasama dengan Uni Eropa maka Tiongkok dapat memperluas pasarnya di Eropa dan dapat melakukan berbagai investasi dalam pembangunan ekonomi Eropa. Dengan adanya kepentingan dari kedua negara ini, maka hal tersebut mendorong terjalinnya kerja sama agar masing-masing negara dapat memenuhi kebutuhannya (Asri, 2014).

Tiongkok saat ini mempunyai keinginan untuk mengembalikan masa kejayaannya di masa lampau. Hal itu disampaikan sendiri oleh Presiden Xi Jinping saat mengunjungi Asia Tengah (Kazakhstan) pada bulan September dan Asia Tenggara (Indonesia) pada bulan Oktober 2013. Xi Jinping mengangkat inisiatif

untuk membuat jalur sutra baru yang dikenal dengan *One Belt, One Road* (OBOR) atau *Belt and Road Initiative* (BRI) (Shinxue, 2015).

BRI sendiri terdiri atas dua unsur utama yaitu *The Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road*. *Silk Road Economic Belt* dijadikan sebagai jalur darat yang mengarah ke provinsi tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Sedangkan *the 21st Century Maritime Silk Road* dijadikan sebagai rute laut yang mengarah kepada provinsi pesisir Tiongkok yang kaya dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api. (Cai, 2017)

Konektivitas dan inisiatif dari proyek BRI membantu menyeimbangkan dan mengoordinasikan mengenai strategi pembangunan negara-negara yang menjadi tujuan Tiongkok dalam *Belt and Road Initiative* nya dengan memastikan potensi besar pasar di kawasan, mempromosikan investasi dan konsumsi, menciptakan permintaan dan peluang kerja, meningkatkan masyarakat dan pertukaran budaya, serta pembelajaran bersama. Dan di antara masyarakat di negara yang terkait, dan berharap untuk memungkinkan mereka untuk memahami, mempercayai dan menghormati satu sama lain dan hidup dalam harmoni, kedamaian dan kemakmuran. (*National Development and Reform Commission* (NDRC) , 2015)

Dalam perkembangannya, kedua belah pihak (Uni Eropa dan Tiongkok) telah melakukan konferensi di Brussels pada 29 Juni 2015 dalam *UE-China Summit* dengan tema utamanya yaitu untuk mempererat kerja sama internasional dan membangun kembali “ *Belt and Road Initiative* “ untuk pembangunan yang saling bermanfaat.

Konferensi tersebut dihadiri oleh Donald Tusk (Presiden Dewan Eropa), Jean-Claude Juncker (Presiden Komisi Eropa) dan Li Keqiang (Perdana Menteri Tiongkok). Konferensi ini juga turut menandai peringatan 40 tahun hubungan diplomatik antara Uni Eropa dan Tiongkok. Para pemimpin mengakui bahwa hubungan mereka telah membuat kemajuan yang signifikan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Uni Eropa mendukung komitmen Tiongkok untuk memperdalam reformasi secara komprehensif serta tujuan Tiongkok untuk membangun masyarakat yang cukup sejahtera dalam segala hal. Tiongkok menyatakan dukungannya untuk upaya UE dalam mendorong pertumbuhan, investasi, dan rencana reformasi regulasi (*European Council of the European Union , 2015*).

Tiongkok dan Uni Eropa sama-sama memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan dalam BRI ini, terutama dalam bidang peningkatan akses pasar dan potensi perkembangan negara-negara di sepanjang BRI. Tiongkok ingin terus meningkatkan perekonomiannya agar tidak terjadi keterlambatan dalam perkembangan ekonominya. Sementara bagi Uni Eropa, mereka ingin membuat pemulihan ekonominya akibat terjadinya resesi hebat yang telah terjadi di masa silam. Uni Eropa berharap agar negara-negara di Uni Eropa akan mendapatkan keuntungan dari BRI sebagai penerima investasi dan lainnya yang dapat berkontribusi pada pembangunan dan stabilitas ekonomi terutama di negara Eropa yang masih belum berkembang.

Maka dari itu, sejak Uni Eropa dan Tiongkok telah mengadakan KTT yang ke-21 yang diadakan di Brussel dan dihadiri oleh Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan Perdana Menteri Dewan Negara Republik Rakyat China. Di

dalam KTT tersebut, mereka menyatakan dan sepakat untuk berkomitmen lebih lanjut lagi di bawah aturan *World Trade Organization* (WTO) sebagai intinya. Mereka membahas mengenai bagaimana hubungan ekonomi mereka kedepannya dan apa saja solusi yang dapat dilakukan agar dapat melaksanakan kerjasama yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam KTT tersebut, mereka memiliki kesempatan untuk membahas kemungkinan sinergi antara rencana konektivitas antara Uni Eropa-Asia dan BRI Tiongkok. Inisiatif tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memfasilitasi pertukaran antara kedua wilayah. Citra antara Uni Eropa dan Tiongkok masih terus berusaha untuk dibangun agar menjadi kuat dan bertahan antara Tiongkok dan Uni Eropa, dengan berhasilnya citra yang dibangun maka hal tersebut akan menjadi keberhasilan bagi kemitraan ini dalam perkembangan BRI untuk kedepannya.

Selama KTT tersebut berjalan, Tiongkok menjelaskan mengenai apa maksud dan tujuannya agar tetap berkomitmen dan tetap transparan dalam kerjasama ini, disisi lain juga Uni Eropa memfokuskan mengenai pentingnya kerjasama dalam penembangan, investasi, dan berbagi teknologi. Kedepannya BRI akan mendapatkan keuntungan besar dari pengumpulan modal intelektual dan keuangannya yang jika digabungkan akan dapat men-sejahterkan negaranya. Baik dari kedua belah pihak tersebut bersama-sama ingin mencapai kepentingan dan keuntungan dai kerjasamanya. Untuk dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan diharapkan dari amsing-masing negara menjalani kerjasama secara transparansi dan saling menguntungkan atau win-win solution.

Uni Eropa melihat bahwa dengan adanya inisiatif dari Tiongkok dalam *Belt and Road* ini dapat membawa keuntungan bagi negara-negara Eropa dalam bidang ekonomi, maka dari itu berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menganalisa mengenai “**Respon Uni Eropa terhadap *Belt and Road Initiative (BRI) Summit 2019***” untuk menganalisa lebih lanjut mengenai apa respon Uni Eropa terhadap *Belt and Road Initiative* dan hasil dari BRI terhadap Uni Eropa pasca EU-China Summit 2019

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam latar belakang, maka penulis membatasi masalah dengan fokus membahas mengenai bagaimana *Belt and Road Initiative* ini dalam bidang ekonomi saja di tahun 2019-2021 dan fokus membahas mengenai negara Yunani dan Hungaria dalam kerja sama BRI. Penulis ingin membahas mengenai apa respon Uni Eropa terhadap *Belt and Road Initiative* dan apa hasil dari BRI bagi Uni Eropa. Dengan batasan masalah tersebut, berikut masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini:

1. Bagaimana respon Uni Eropa terhadap *Belt and Road Initiative (BRI) Summit 2019*?
2. Apa hasil dari *Belt and Road Initiative (BRI)* terhadap Uni Eropa pasca BRI Summit 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana respon Uni Eropa terhadap *Belt and Road Initiative (BRI) Summit 2019*

2. Untuk mengetahui apa hasil dari *Belt and Road Initiative* (BRI) terhadap Uni Eropa pasca BRI Summit 2019

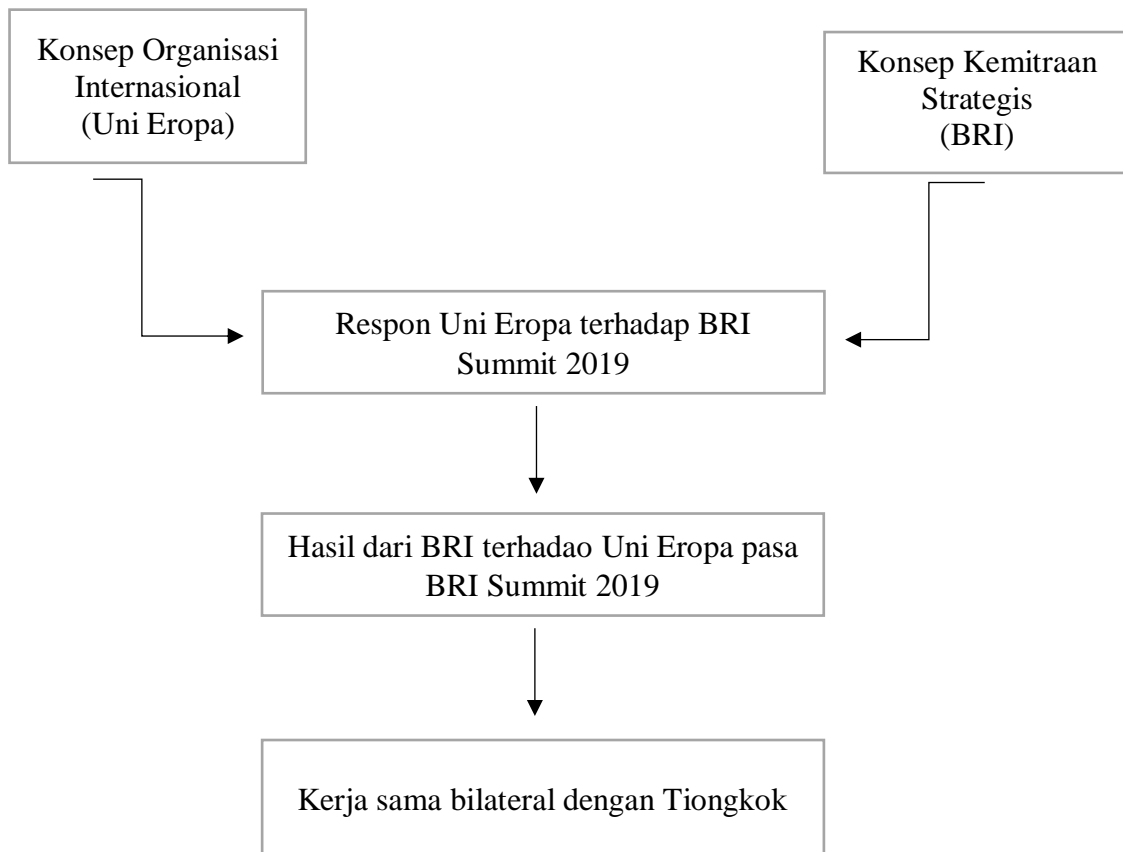
2) Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana respon Uni Eropa terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI) Summit 2019 dan apa hasil dari BRI terhadap Uni Eropa pasca BRI Summit 2019
- b. Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas terkait respon Uni Eropa terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI) Summit 2019 dan hasil dari BRI terhadap Uni Eropa pasca BRI Summit 2019

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yaitu organisasi internasional dan kemitraan strategis. Konsep organisasi internasional dijadikan sebagai landasan mengenai peran Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang memiliki peran penting bagi negara-negara eropa yang berguna untuk meningkatkan ekonomi di Eropa. Sedangkan kemitraan strategis sebagai salah satu bentuk kerja sama antara negara-negara tersebut untuk menjalin hubungan yang menguntungkan dibawah kemitraan strategis mereka.

BAGAN 1.1. Kerangka Konseptual Penelitian



1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu kajian dalam hubungan internasional, organisasi internasional itu sendiri ialah salah satu non-state actor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional dapat dikatakan sebagai suatu ikatan formal yang dapat melewati batas wilayah internasional. Jika terdapat suatu negara yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam negaranya

sendiri, maka organisasi internasional dapat membantu didalamnya tetapi dengan syarat harus menghargai kedaulatan tersebut.

Uni Eropa sendiri merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki peran penting bagi negara-negara Eropa, karena dapat dikatakan bahwa Uni Eropa mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi negaranya terutama dalam bidang pasar bebas, hal tersebut berguna untuk men-sejahterakan masyarakat Eropa. (*European Union, 2020*) Dengan adanya Uni Eropa sebagai organisasi internasional, diharapkan kedepannya agar organisasi ini dapat menjadi tempat bagi negara-negara eropa untuk melakukan suatu hubungan atau kerjasama dengan negara lainnya.

Organisasi internasional itu sendiri memiliki peran yang penting sebagai pedoman untuk memberi pendapat pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dalam buku "*International Organization: Basic and Principles*", organisasi internasional memiliki definisi sebagai suatu bentuk interaksi antara pihak-pihak tertentu (aktor negara dan aktor non-negara) yang nantinya dilembagakan sehingga mempunyai asas, tujuan, pengurus, dan anggota (Bennet, 1988).

Organisasi internasional hadir karena terdapat kebutuhan dan kepentingan yang dimiliki setiap negara, maka dari itu prasyarat untuk mendirikan suatu organisasi internasional ialah keinginan untuk bekerjasama secara internasional yang memberikan manfaat, asalkan pendirian organisasi tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggotanya. Oleh karena itu, Negara-negara yang berdaulat menyadari bahwa kehadiran organisasi internasional itu penting untuk kelangsungan hubungan antarnegara ataupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Sama halnya dengan Uni Eropa yang menjadi sarana bagi setiap negaranya untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi negara anggotanya.

Dalam buku *International Organizations*, Clive Archer mengatakan organisasi internasional itu merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibangun atas suatu kesepakatan bersama antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 1983).

Di dalam Organisasi Internasional, kerja sama internasional sangat dibutuhkan karena berguna untuk sejumlah macam kepentingan nasional dari berbagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Kerja sama dapat diartikan menjadi kaitan hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional yaitu PBB atau Uni Eropa.

2. Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*)

Kemitraan strategis (*Strategic Partnership*) merupakan suatu bentuk atau fitur yang baru dalam sistem hubungan internasional, yang berkembang dan mewakili prinsip baru untuk mengatur kehidupan dunia internasional yang sistemik dan khusus untuk masalah tertentu. Hingga dewasa ini, kemitraan strategis menjadi strategi baru dalam dunia internasional karena memungkinkan untuk interaksi dan keterlibatan antara sahabat atau saingan, juga bagi mereka yang bukan sekutu. Hal tersebut menjadikan kemitraan strategis ini diperlukan untuk interaksi yang strategis dalam abad ini.

Kemitraan strategis telah didefinisikan sebagai bentuk khusus dari keterlibatan bilateral antara dua aktor dalam sistem internasional dengan tujuan menciptakan hubungan bilateral yang istimewa. Kemitraan strategis dapat dipahami sebagai tempat, atau pengaturan istimewa di mana aktor terlibat dalam persuasi, permainan peran, atau jenis interaksi sosial lainnya.

Kemitraan strategis memiliki bentuk (format) dan proses, sedangkan tujuan (fungsi) yang mungkin berbeda dari konteks ke konteks. Untuk kekuatan kecil dan menengah tujuannya untuk mencapai status istimewa sebagai mitra strategis dengan aktor internasional sedangkan untuk bentuk yang lebih kuat berfungsi sebagai alat untuk menegaskan secara tidak langsung mengenai relevansi strategis mereka dalam urusan internasional, yang dapat dicapai dengan melampaui manfaat dari kerja sama strategis yang berorientasi untuk tujuan bilateral. (Tyushka, 2019)

Dalam hubungan internasional, kemitraan strategis adalah mode yang muncul dari keterlibatan internasional dan vektor asosiasi politik asing dalam polisentrik (multipolar, multinodal, post-bi / unipolar) dan poli-agensial (multi-kekuasaan, multi-aktor, multi- agensi) dunia. Baik kekuatan global, negara kecil maupun organisasi internasional, mereka berusaha keras untuk merancang kemitraan strategis agar memenuhi agenda politik luar negeri mereka dan untuk menghindari diidentifikasi sebagai aktor 'bebas kemitraan' (tanpa mitra atau tanpa mitra). Oleh karena itu, fenomena ini dapat mengungkapkan signifikansinya sebagai aspek yang relevan dengan kebijakan dan citra dari hubungan internasional modern. (Tyushka, 2019)

Jumlah angka kemitraan strategis telah berkembang selama dekade ini, terdapat dua negara dengan kemitraan strategis yang paling berpengaruh dalam dunia internasional, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, mereka telah menjalani lebih dari 130 kemitraan strategis, sementara aktor internasional penting lainnya seperti Uni Eropa, Rusia, Brasil, India, Jepang, Afrika Selatan, dan Australia.

Hingga saat ini Tiongkok telah menjalin hampir 70 kemitraan strategis, sehingga ia menciptakan jaringan tautan strategis yang benar-benar berbeda dengan kekuatan besar dan yang baru muncul serta dengan organisasi internasional di seluruh dunia. Di antara organisasi internasional, mitra strategis Tiongkok adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Uni Eropa (UE), Uni Afrika (AU), Liga Arab (AL) dan Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC). Hal tersebut menjadikan kemitraan strategis sebagai aspek utama dan menjadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri Tiongkok.

Sedangkan bagi Uni Eropa, ia melihat bahwa konsep dari kemitraan strategis ini dapat memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara atau organisasi negara. Uni Eropa berpendapat akan pentingnya untuk menjalin kemitraan strategis dengan kekuatan global. Uni Eropa telah mengadopsi pendekatan kemitraan strategis dengan melihatnya lebih sebagai pelengkap diplomatik untuk perjanjian asosiasinya daripada elemen penting dari kebijakan luar negeri yang berorientasi strategis (Union, 2003). Uni Eropa sendiri telah menjalin beberapa kemitraan dengan beberapa negara di dunia, salah satunya yaitu Tiongkok.

Semua kemitraan strategis Tiongkok di nilai bersifat komersial, politik, dan strategis, Tiongkok mencoba untuk memanfaatkan ke-strategisannya untuk menuju ekonomi dunia. Salah satunya yaitu *Belt and Road Initiative*, inisiatif dari Tiongkok tersebut merupakan proyek unggulan kebijakan luar negeri Tiongkok dan telah banyak negara-negara yang turut bergabung dan menandatangani kemitraan dengan negara tersebut. Salah satu mitra dari Tiongkok dalam *Belt and Road Initiative* tersebut ialah Uni Eropa yang dimana ia telah menyambut baik Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative ini*. (Michalski, 2019)

E. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif, penulis menggunakan metode ini karena ingin mendeskripsikan dan menganalisis mengenai respon dan hasil dari BRI terhadap Uni Eropa dalam kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan Tiongkok. Metode ini digunakan oleh penulis karena penulis ingin mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai data yang telah didapatkan.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini yaitu telaah Pustaka (Library Research) yaitu metode pengumpulan data-data terkait yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, laporan, artikel, atau surat kabar yang diperoleh melalui media *online* maupun *offline*.

3) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis yakni data yang diperoleh dari sumber sekunder. Penulis akan memilih data yang berasal dari jurnal atau karya-karya ilmiah, sumber pustaka dalam hal ini buku, kumpulan artikel, maupun berita-berita di internet yang akurat dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

4) Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis yakni analisis data kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya nantinya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argument yang tepat.

5) Metode Penulisan

Penulisan menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional

Dalam hubungan internasional, tidak hanya menjalin hubungan antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara, maupun negara dengan organisasi internasional. Hal tersebut karena, adanya organisasi internasional telah diakui keberadaannya dalam menyelesaikan berbagai isu yang terjadi. Organisasi internasional itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu ikatan formal yang dapat melampaui batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk dapat membentuk suatu kelembagaan agar memudahkan kerja sama dengan berbagai pihak maupun berbagai bidang. Organisasi internasional dewasa ini dianggap sebagai salah satu aktor internasional penting yang bisa memberi manfaat terhadap negaranya.

Minat untuk membentuk organisasi internasional ialah agar dapat memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini telah hadir sejak lama di benak para bangsawan. Organisasi internasional merupakan salah satu ilmu yang utama dalam studi hubungan internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. A. Lerroy Bennet dalam bukunya *International Organizations: Principles and Issues* menjelaskan asal didirikannya organisasi internasional ialah dengan tujuan untuk menetapkan aturan yang ada agar dapat berjalan tertib agar dapat mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional juga dapat dijadikan sebagai wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan setiap negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional. (Bennet L. R., 1997)

Organisasi internasional diartikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan bersama antara anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama. Untuk dapat mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non-negara. (Anak A B Perwita, 2005)

Michael Hass sendiri melihat organisasi internasional dalam dua pengertian, yaitu: Satu, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Dua, organisasi internasional adalah suatu pengaturan bagian-bagian yang telah menjadi satu kesatuan utuh di mana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini. (Hass, 1969)

Pemikiran mengenai organisasi internasional itu terlihat dari berbagai macam. Hal tersebut didukung karena organisasi internasional tersebut merupakan suatu aktor yang penting dalam sebuah politik internasional, karena kekuatan mediasi, penyelesaian sengketa, menjaga perdamaian, menegakkan sanksi, dan lainnya. Organisasi internasional juga turut membantu dalam mengelola berbagai isu permasalahan yang menarik perhatian internasional, dari segala aspek mulai dari kesehatan global maupun mengenai kebijakan moneter di seluruh dunia (Abbot, 1998).

Maryan Green mengemukakan pendapat dalam pengertian organisasi internasional yaitu “ *The term International organization is an organization established by an treaty to which three or more state are parties*” yang perlu diketahui bahwa organisasi internasional itu dibentuk dan diciptakan oleh negara-negara. Maka dari itu, organisasi internasional itu hasil bentukan dari satu negara, organisasi internasional bukanlah subjek asli hukum internasional, melainkan subjek hukum buatan sendiri yang menjadikan organisasi internasional hasil dari kesepakatan antara negara-negara yang mendirikaninya. (Siahaan, 2021)

Terdapat berbagai fungsi organisasi internasional yang dikemukakan para ahli. Menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan kedalam lima kategori besar, yaitu fungsi informatif, normatif, role-creating, role supervisory, dan operasional, yaitu sebagai berikut:

- a) *Fungsi informatif* yaitu pengumpulan, penganalisaan, penukaran dan penyebaran berbagai data dan fakta yang terjadi di dunia internasional. Dalam hal ini organisasi internasional dapat menjadi anggota untuk tujuan tersebut dalam dunia internasional.
- b) *Fungsi normatif* dari organisasi internasional yaitu meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Hal tersebut tidak terikat oleh legalisasi instrumen akan tetapi ketetapanannya dipengaruhi oleh lingkungan domestik dan politik internasional.
- c) *Fungsi role-creating* dari organisasi internasional sama seperti fungsi normative, tetapi disini dibatasi oleh bingkai legalitas yang memengaruhinya.

- d) *Fungsi role-supervisory* dari organisasi internasional yaitu, pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya peraturan oleh para aktor. Fungsi ini membutuhkan langkah dalam pengoperasiannya, berawal dari Menyusun fakta-fakta yang didapat dari pelanggaran yang terjadi kemudian fakta-fakta diverifikasi untuk memberi pembebanan saksi.
- e) *Fungsi operasional* dari organisasi internasional meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu pendanaan, pengoperasian, sub-organisasi dan penyebaran operasi militer. (Jacobson, 1984)

Teuku May Rudy dalam bukunya yang berjudul “Administrasi dan Organisasi Internasional“ juga menegaskan bahwa peran organisasi internasional ialah sebagai wadah atau forum untuk melaksanakan kerja sama dengan meminimalisir terjadinya konflik antar sesama anggota, dan juga sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama dengan hasil yang saling menguntungkan. Organisasi internasional juga menjadi lembaga yang mandiri untuk menyelesaikan kegiatan yang diperlukan seperti kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, peace keeping, operation, dll) (Rudy, 2005).

Umar S Bakry sendiri mengklasifikasi organisasi internasional kedalam dua klasifikasi, yaitu *Intergovernment Organization (IGO)* dan *Non-Government Organization (NGO)*:

- a. *Intergovernment Organization (IGO)*, merupakan organisasi antar-pemerintah, yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara berdaulat di mana mereka bertemu secara regular dan memiliki staf

yang *fulltime*, keanggotaan IGO umumnya bersifat sukarela, sehingga kehadirannya tidak mengancam kedaulatan negara.

- b. *Non-government Organization* (NGO), organisasi non-pemerintah, suatu organisasi yang sudah terstruktur dan beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan resmi dengan suatu negara. (Bakry, 1999)

Hingga saat ini peran organisasi internasional dalam hubungan internasional telah diakui karena keberhasilannya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai mampu dalam mempengaruhi tingkah laku cara secara tidak langsung. Dengan adanya organisasi internasional ini dapat memberikan kebutuhan individu untuk bekerjasama, sekaligus sebagai tempat untuk dapat menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Peranan organisasi internasional itu sendiri dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional ini dapat dijadikan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan sarana bertemu bagi negara anggota anggotanya untuk membahas masalah-masalah yang terjadi. Tidak jarang organisasi internasional dimanfaatkan oleh negara untuk mengangkat masalah dalam negara lainnya maupun masalah dalam negeri lain.

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa adanya pengaruh oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. (Archer, 1983)

Coulumbus dan Wolfe selaku penempuh studi Ilmu Hubungan Internasional mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan menggabungkan antara keanggotaan dengan tujuan. Mereka berpendapat bahwa IGO dapat di klasifikasikan menjadi empat kategori berdasar pada keanggotaan dengan maksud dan tujuannya, yaitu:

1. *Global membership and general purpose*, organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global beserta maksud dan tujuan umum, seperti: PBB.
2. *Global membership and limited purpose organization*, yaitu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global yang memiliki tujuan tersendiri. Organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.
3. *Global membership and general purpose organization*, yaitu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum bergerak di bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dsb.
4. *Regional membership and limited purpose organization*, yaitu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dsb. (Wolfe, 1996)

Berdasarkan klasifikasi yang diajukan oleh Coloumbis dan Wolfe diatas, Uni Eropa ialah suatu organisasi supra nasional yang memiliki anggota hampir seluruh negara di Kawasan Eropa dengan memiliki peran sebagai suatu wadah untuk menampung semua aspirasi, kepentingan negara anggota dan berusaha untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang disalurkan oleh negara-negara anggota. Uni Eropa hadir agar lebih mempererat hubungan antar negara di Eropa.

Eropa sendiri telah berdiri setelah terjadi Perang Dunia ke-2 yang menjadi langkah pertama untuk mendorong kerjasama ekonomi. Gagasan utama dari berdirinya organisasi ini ialah untuk mewujudkan kemitraan ekonomi yang kokoh agar mengurangi kemungkinan terjadinya suatu konflik. Maka jadilah, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang dibentuk pada tahun 1958, sejak dibentuknya MEE pasar tunggal yang besar terus berkembang. Organisasi tersebut menjalani perkembangan MEE ini lagi hanya terbatas mengenai masalah ekonomi saja akan tetapi organisasi tersebut mulai mencakup ke dalam berbagai bidang mulai dari bantuan pembangunan, hingga masalah lingkungan. Akan tetapi seiring berjalannya tahun, di tahun 1993 telah terjadi perubahan nama organisasi tersebut dari MEE menjadi *European Union* (EU) atau Uni Eropa. (Commisions, 2020)

Uni Eropa merupakan suatu organisasi yang bersifat unik, karena negara anggotanya tetap menjadi negara yang berdaulat dan merdeka, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dengan sedemikian rupa untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar lagi. Dalam praktiknya, penggabungan kedaulatan berarti negara-negara anggota bersedia untuk mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada lembaga yang telah didirikan bersama sehingga keputusan mengenai masalah

tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa.

Uni Eropa memiliki beberapa lembaga yang mengatur dalam proses kerjanya. Lembaga tersebut dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Parlemen Eropa (*The European Parliament*), yaitu legislatif yang mewakili negara Eropa dan mempunyai fungsi legislatif, budget dan pengawasan eksekutif.
2. Dewan Eropa (*The European Council*), forum diskusi kepala negara pemerintahan negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Pasal 4 traktat Uni Eropa mensyaratkan dewan untuk bersidang dua kali dalam setahun di bawah kepemimpinan kepala negara atau pemerintah negara anggota yang sedang menjabat sebagai presidensi uni Eropa (berganti setiap 6 bulan).
3. Komisi Eropa (*The European Commission*), menjadi penggerak dalam membangun Eropa. Traktat Komunitas Eropa menyatakan bahwa hanya Komisi yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan proposal (RUU). Tidak ada badan Uni Eropa lain maupun negara anggota yang berhak untuk mengajukan proposal selain Komisi. Bahkan proposal yang diajukan, ditolak oleh Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa melalui pengambilan keputusan, maka hanya Komisi yang berhak merubahnya (kecuali ditolak secara *unanimity*). Komisi juga mempunyai peran sebagai penjaga seluruh hukum dan perundangan Uni Eropa. Dalam kaitan ini, salah satu tugas utama Komisi adalah memastikan negara anggota mematuhi semua hukum Uni Eropa.

4. Dewan Uni Eropa, yang biasanya di sebut dengan *the Council of Ministers* adalah forum pertemuan para Menteri negara-negara anggota dan merupakan badan pengambil keputusan utama di Uni Eropa. Dewan Uni Eropa ini dapat mengambil keputusan melalui prosedur pembulatan suara, dan dalam sektor sektor di mana keputusan parlemen dibutuhkan. Dewan mengambil keputusan melalui mayoritas yang layak meskipun pada umumnya disebut hanya dengan dewan tetapi pada praktiknya terdapat 16 formasi dewan, yaitu: masalah umum, pertanian, lingkungan, ekonomi dan keuangan, sosial. (Siahaan, 2021)

Penulis dalam hal ini menjadikan organisasi internasional sebagai salah satu peran yang penting bagi negara-negara anggotanya untuk membuat suatu kesepakatan bersama. Khususnya dalam kerja sama dengan Tiongkok dibawah proyek BRI. Adanya Uni Eropa sebagai organisasi internasional ini menjadikan Uni Eropa memiliki peran penting dalam hubungan negara anggotanya dengan Tiongkok. Sama halnya dengan tujuan Uni Eropa terbentuk untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dan dapat membantu negara lainnya

Sama halnya dalam kerja sama Tiongkok dengan negara anggota di Uni Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi internasional memiliki tujuan untuk mensejahterakan negara anggotanya dengan menjalin kerja sama dengan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu Uni Eropa telah memberikan beberapa syarat untuk menjalin kerja sama dengan Tiongkok di bawah BRI. Hal tersebut berguna agar kedepannya negara anggotanya turut mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang telah dilakukan. Perlu bagi negara

anggota untuk memenuhi syarat tersebut agar dapat menghasilkan win-win solution.

B. Kemitraan Strategis Negara & Organisasi Internasional

Di dalam era perpolitikan internasional setelah perang dingin usai di tahun 1990-an, negara-negara di dunia telah memasuki ke masa transisi, yang dimana masa berbentuk hubungan konfrontasi atau kooperasi yang bisa saja mewarnai hubungan antar negara di dunia dengan yang terjadi secara kontekstual. Di mana terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai kemitraan strategis. Ini diusulkan oleh pembuat kebijakan Soviet pada hari hari terakhir Uni Soviet sebagai perangkat alternatif untuk aliansi dan Lembaga regional untuk mengelola keamanan dan kerjasama ekonomi.

Kemitraan strategis merupakan suatu keadaan dimana suatu kebijakan luar negeri suatu negara berusaha untuk mencari aliansi-aliansi, hubungan-hubungan, serta kerjasama yang bersifat strategis untuk menambah potensi tercapainya kepentingan nasional masing masing negara. Saat ini kemitraan strategis yang memungkinkan untuk timbul adanya fleksibilitas dalam menjalankan kepentingan luar negeri yang memang sangat dibutuhkan apabila ingin mencapai apa yang disebut sebagai kepentingan nasional. (Rio Akbar Pramanta, 2018)

Hubungan dalam kemitraan strategis yaitu kesetaraan antar negara - negara dengan mitra kerjanya, dan bentuk dari kerja sama itu diharuskan saling menguntungkan dan saling menang atau (win-win) kemitraan strategis itu dibangun berdasarkan atas adanya rasa saling menghargai dan menghormati antar negara mitranya dengan tujuan untuk mencapai landasan bersama dan mengejar kepentingan bersama dan mengesampingkan perbedaan yang ada.

Wilkins berpendapat bahwa kemitraan strategis ini dapat pula dianggap sebagai salah satu pola dasar dalam taksonomi keberpihakan, yang juga mencakup aliansi, koalisi, komunitas keamanan, persentasi dan pakta non agresi. Wilkins juga membahas mengenai empat sifat kemitraan strategis yaitu hal tersebut didasari pada prinsip sistem, didorong oleh tujuan, cenderung bersifat Informal dan sering dikaitkan dengan pertukaran ekonomi dan masalah keamanan tradisional. (Wilkins, 2012)

Wilkins turut mendefinisikan kemitraan strategis sebagai suatu kolaborasi yang terstruktur antar negara maupun aktor lainnya untuk mendapatkan keuntungan bersama dari peluang ekonomi, atau juga untuk merespon mengenai keamanan secara lebih efektif dari yang dapat dicapai. Kemitraan strategis juga terjadi baik di dalam maupun di luar antar sektor domestik maupun internasional. Kemitraan strategis tidak hanya memungkinkan untuk dapat berbagi informasi, keterampilan, maupun sumber daya untuk dibagikan akan tetapi kemitraan strategis juga memungkinkan mitra untuk berbagai resiko bersama. (Wilkins T. S., 2008)

Holslag mengemukakan terdapat lima pilar utama dari kemitraan strategis yaitu mengidentifikasi minat dan harapan, menjadi susunan untuk jangka panjang, menjadi multi dimensi dan dioperasionalkan di bidang ekonomi politik dan militer, memiliki jangkauan global, dan menjadi hubungan di mana intensif itu harus bersifat sedemikian rupa agar tidak dapat dicapai tanpa kemitraan dan berfungsi untuk membedakannya dari hubungan yang lain. (Holslag, 2011)

Avery Goldstein mengatakan bahwa esensi dari kemitraan strategis itu ialah komitmen untuk mempromosikan mengenai hubungan yang stabil dan hubungan ekonomi negara dengan luas, menghilangkan ketidak sepakatan tentang politik

dalam negeri untuk kepentingan bekerjasama dalam hal-hal yang menjadi perhatian dunia dalam diplomasi internasional dan rutin melakukan pertukaran kunjungan yang resmi, terutama yang dilakukan oleh perwakilan masing masing (Goldstein, 1893)

Kemitraan strategis dapat juga digunakan sebagai alat oleh negara berkembang maupun negara super power untuk dapat memaksimalkan dominasi politik nya ekonomi dan militer dalam sistem internasional. Kemitraan strategis ini dengan demikian juga dapat menjadi sarana untuk membentuk suatu lingkungan internasional agar sesuai dengan kepentingan vital suatu negara. (Sean, 2010)

Di dalam kemitraan strategis terdapat beberapa formasi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama, pembentukan kemitraan strategis diatur oleh beberapa faktor utama seperti ketidakpastian lingkungan, kesesuaian strategis, dan sistem prinsip. Mytelka berpendapat bahwa kemitraan strategis didorong agar terbentuk sebagai suatu tanggapan atas ketidakpastian di lingkungan eksternal atau internasional (Mytelka, 1991). Pada dasarnya para calon mitra akan berusaha untuk mengurangi beberapa elemen persaingan dari lingkungan ini keamanan internasionalnya hal tersebut berguna untuk menghindari terjadinya konflik dan menggabungkan kekuatan dari calon mitra.

Kedua, untuk menghindari dari ketidakpastian tersebut diharapkan agar para aktor memulai untuk pencarian untuk mengidentifikasi kesesuaian kedua belah pihak. Kolaborator yang diinginkan dinilai berdasarkan dari kepentingan bersama (kemungkinan juga dari nilai atau ideologi bersama), untuk kesesuaian strategis secara keseluruhan. Negara juga harus memiliki kemampuan atau manfaat yang

berharga, terutama untuk saling melengkapi sumber daya untuk mitranya. (Bergquist, 1995)

Ketiga, setelah diidentifikasi mitra strategis yang cocok, mereka akan berhasil untuk menjalin kerja sama dan memastikan untuk mengadakan adanya kolaborasi. Tujuan bersama tersebut telah menjadi kerangka kerja kesepakatan bersama dan pemahaman yang dikenal sebagai prinsip sistem. Prinsip sistem biasanya didasari pada kepentingan dan nilai bersama untuk membentuk pandangan dunia secara bersama sama. Setelah kesepakatan tersebut pada tahap penutupan prinsip prinsip sistem ini disaring menjadi serangkaian tujuan bersama yang spesifik untuk kemitraan. (Etzioni, 1964)

Berdasarkan dari penjelasan di atas, inti dari kemitraan strategis tersebut ialah di mana kerja sama antar negara dibuat untuk mencapai kepentingan bersama. Meskipun demikian, terlepas dari perjanjian tersebut perlu juga dicatat bahwa tujuan bersama atau kepentingan bersama dapat diinterpretasi kan secara berbeda oleh masing masing negara anggota dan mungkin juga tujuan yang tidak resmi bagi mereka sendiri. Setelah dari formasi kemitraan strategis diatas, menurut Bergquist mitra harus menghadapi tantangan yang akan datang, yaitu tantangan implementasi (khususnya dalam membangun dan memelihara hubungan mitra). Fase implementasi ini disertai dengan difusi struktur kelembagaan / organisasi yang mengatur pola interaksi antar mitra.

Struktur organisasi merupakan urusan yang sangat rumit karena terdapat kemitraan dari dua negara bagian atau lebih dan organisasi yang multilateral yang memiliki birokrasinya sendiri. Pertama, kompleksitas organisasi akan meningkat karena semakin banyaknya jumlah mitra di dalamnya seperti Uni Eropa. Kedua,

harus ditekankan bahwa negara-negara mitra tidak menggabungkan perangkat organisasinya maupun identitas negaranya masing masing, karena setiap kemitraan tersebut akan melibatkan negara bagian yang berbeda dan setiap kemitraan akan dirancang secara unik. (Wilkins T. S., 2008)

Struktur organisasi ini dengan demikian juga mengatur mengenai interaksi antar negara-negara mitra dalam hubungan tersebut. Hal ini turut mempengaruhi perilaku aktor lain dalam hubungannya dengan kemitraan itu sendiri. Struktur organisasi yang kurang baik di definisikan sebagai kemitraan yang buruk atau lemah karena ketidakseimbangan kekuatan yang melekat atau adanya konflik antar mitra yang menghambat implementasinya menjadi sukses atau berhasil.

Kemitraan strategis harus dievaluasi agar kemajuan dan keberhasilannya sesuai dengan yang diinginkan dan mencapai tujuannya. Evaluasi tersebut hadir agar hubungan kedua mitra akan semakin kohesif dan semakin kuat insentifnya bagi mitra untuk bekerja sama agar dapat mencapai hasil bersama. Joan M. Roberts berpendapat bahwa keberlangsungan hidup organisasi secara erat terkait dengan keberhasilannya dalam mencapai tujuan, tidak ada organisasi yang akan bertahan selamanya, tetapi kebanyakan organisasi akan berkembang dengan asumsi bahwa mereka akan menjadi permanen jika mereka berhasil dalam menjalankan misinya (Roberts, 2004)

Jika suatu organisasi terbukti efektif dalam memajukan misinya, maka organisasi tersebut berpotensi untuk semakin berkembang, beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternal serta membangun kapasitasnya. Karena, mitra strategis yang baru dapat dicari dan akan diundang untuk bergabung kedalam rencana yang sudah ada.

Uni Eropa sendiri telah membangun kemitraan strategis dengan kekuatan global dan regional yang penting tampaknya merupakan bagian penting dari pendekatannya semakin elektik untuk menangani dunia multipolar yang mengglobal. Sejak 2010, alat kebijakan luar negeri khusus yang dibuat ini menjadi terkenal sebagai komponen internasional Uni Eropa.

Keberadaan kemitraan strategis pada awalnya di akui oleh Uni Eropa dalam kerangka strategi keamanan Eropa (*European Security Strategy*) pada tahun 2003, yang secara khusus dipengaruhi oleh perkembangan yang tak tertandingi yang muncul dari serangan teroris 11 September 2001 dan intervensi militer Anglo Amerika berikutnya di Irak. (Council, 2010)

Strategi keamanan Eropa menegaskan bahwa perlu untuk ditingkatkan lagi statusnya untuk menjadi mitra strategis, negara yang bersangkutan dengan Uni Eropa harus mendukung tujuan dan nilai dari Uni Eropa dan harus bersedia untuk mendukungnya dalam menjalani kemitraan. Pendekatan kemitraan strategis ini diakui kualitasnya oleh pimpinan Uni Eropa dalam kerangka dinamika kerjasama yang melibatkan mitra strategis di bidang lunak seperti perdagangan, kebijakan lingkungan, dan energi. Oleh karena itu kemitraan strategis ini tercermin dalam berbagai format seperti kemitraan dan kesepakatan kerja sama, dialog politik, kesepakatan sektoral, dan forum kebijakan.

Di dalam perspektif ini, Uni Eropa cenderung menganggap kemitraan strategis sebagai negara ketiga tertentu yang menunjukkan disposisi untuk melakukan perilaku tiruan dengan imbalan ekonomi, diplomatik, dan perdagangan. Jika dilihat melalui lensa model power Uni Eropa, upaya yang dilakukan kemitraan strategis di tingkat politik tertentu tertinggi untuk menjamin keberlangsungan

implementasinya sesuai dengan input insentif bagi mitra strategis untuk terus berupaya mengikuti jalur yang benar yang sejalan dengan standar dan praktik terbaik Uni Eropa. (Vieira, 2016)

Gagasan utama mengenai kemitraan strategis awalnya diutarakan oleh Presiden Chirac dan Jiang Zemin di tahun 2003 yang menyatakan tujuan bersama mereka untuk mempromosikan tatanan dunia multipolar. Sedangkan di tahun 2003 ada pernyataan bersama dari KTT Tiongkok dan Uni Eropa yang mempertimbangkan intensitas dan cakupan yang diperluas dari hubungan Tiongkok dan Uni Eropa sebagai indikator dari peningkatan kedewasaan dan pertumbuhan strategis.

Di bulan Oktober 2003, timbul pernyataan bersama dari KTT Tiongkok dan Uni Eropa yang mempertimbangkan bahwa intensitas dan cakupan perlu dari struktur yang berlapis-lapis dari hubungan Tiongkok dan Uni Eropa sebagai indikator dari peningkatan kedewasaan dan sifat strategis yang berkembang dari kemitraan. Di bulan desember 2003 telah diluncurkan mengenai strategi keamanan Eropa yang memasukkan Tiongkok sebagai salah satu dari enam mitra strategis Uni Eropa.

Di tahun 2004, Wen Jiabao selaku mantan Perdana Menteri Tiongkok melakukan speech yang berjudul “*Vigorously Promoting Comprehensive Strategic Partnership Between China and the European Union*” yang menegaskan bahwa Tiongkok dan Eropa harus mengarah kepada kemitraan strategis yang komprehensif. Yang dimaksudkan dari “kemitraan” adalah kerja sama harus saling sejajar dan saling menguntungkan. Sedangkan “strategis” ialah bahwa kerja sama tersebut harus berjangka panjang dan stabil yang mengacu kepada gambaran yang

lebih luas mengenai hubungan Tiongkok dan Uni Eropa. Kedua belah pihak harus mendasari diri kepada rasa saling menghormati dan rasa saling percaya serta berusaha untuk memperluas kepentingan yang bersatu dan mencari kesamaan pada masalah utama dengan berusaha mengesampingkan perbedaan pada yang kecil.

Kemitraan strategis komprehensif antara Tiongkok dan Uni Eropa adalah pembangunan alami yang dibentuk oleh fakta-fakta kehidupan yang memiliki fondasi yang kokoh, yaitu:

- 1) Situasi internasional dewasa ini telah mendalami perubahan yang luar biasa dan signifikan. Perdamaian dan pembangunan menjadi tema utama yang menawarkan lingkungan internasional yang menguntungkan bagi perluasan substansial hubungan Tiongkok dan Uni Eropa.
- 2) Bagi Tiongkok maupun Uni Eropa turut mengikuti program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan keadaannya. Uni Eropa terus mendorong integrasi melalui serikat pekerja sedangkan Tiongkok telah bergerak ke tahap baru dalam membangun masyarakat yang makmur secara menyeluruh.
- 3) Tiongkok dan Uni Eropa saling melengkapi secara ekonomi, Tiongkok memiliki potensi pasar yang besar dan sumber daya manusia yang melimpah, dan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk menerima industri internasional dan transfer teknologi. Di sisi lain, Uni Eropa adalah ekonomi maju terbesar di dunia, dengan modal yang cukup, ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, dan tingkat internasionalisasi yang tinggi. Komplementaritas ini memberikan landasan yang kokoh bagi kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pihak.

- 4) Tiongkok dan Eropa memiliki sejarah dan peradaban kuno yang indah. Mengakui identitas budaya satu sama lain dan melakukan berbagai bentuk pertukaran budaya menjadi jembatan penting bagi hubungan erat antara Tiongkok dan Eropa.
- 5) Kedua belah pihak telah mengumpulkan pengalaman yang cukup dalam menangani sengketa dengan benar dan menyelesaikan perbedaan dengan memilih dialog dan menolak konfrontasi tidak hanya mencerminkan kedewasaan hubungan yang ada, tetapi juga memastikan perkembangan masa depan yang sehat.

Wen Jiabao juga turut mengatakan bahwa dan Uni Eropa saling membutuhkan dalam mengejar pembangunan ekonomi masing masing. Saat ini hubungan Tiongkok dan Uni Eropa menemukan dirinya dalam awal yang baru, dengan banyak hal untuk dikembangkan dan dinantikan. Tiongkok dan Uni Eropa adalah mitra yang baik dan menjanjikan dalam perdagangan dan kerjasama ekonomi. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan “orang yang benar-benar bijak cenderung menangkap peluang daripada sekedar menyusun rencana“ (Wen Jiabao, 2004)

Dengan adanya kemitraan strategis yang telah terjalin antara Tiongkok dan Uni Eropa menjadikan hal tersebut sebagai salah satu strategis dari kedua belah pihak untuk melaksanakan kerja sama kedepannya, hal ini juga berlaku bagi negara anggota Uni Eropa untuk menjalankan hubungan bilateral dengan Tiongkok. Salah satunya yaitu proyek BRI, dimana proyek ini telah berhasil merangkul beberapa negara di Uni Eropa dengan menggunakan kemitraan strategis sebagai suatu pendekatan antara kedua belah pihak. Sama halnya dengan beberapa negara Uni Eropa yang telah menjadikan kemitraan strategis sebagai salah satu tolak ukur

untuk menjalin kerja sama dengan Tiongkok untuk melaksanakan proyek dibawah naungan BRI.

Dengan adanya BRI ini, diharapkan bahwa hubungan Tiongkok dan Uni Eropa akan terus mengarah kepada kemitraan strategis yang komprehensif. Yang dimana kerja sama tersebut harus berjangka panjang dan stabil yang mengacu kepada kerja sama BRI tersebut, diharapkan dengan adanya BRI dapat membawa potensi yang besar bagi pasar Eropa dan menguntungkan ekonomi dan kondisi sekitar. Dengan adanya kemitraan strategis yang terjalin diharapkan agar dapat menjamin keberlangsungan implementasi BRI sesuai dengan jalur yang benar dan sejalan dengan standar Uni Eropa.

C. Penelitian Terkait

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana respon Uni Eropa terhadap BRI Summit 2019 melalui konsep Organisasi Internasional dan Kemitraan Strategis. Terdapat satu penelitian mengenai topik terkait dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut berjudul "*The European Union approach to the One Belt One Road Initiative*" bagaimana pendekatan Uni Eropa terhadap Belt and Road Initiative (BRI) oleh Josep Lluís Mari Cervera yang membahas bagaimana implikasi BRI kepada negara anggota Uni Eropa dengan kekuatan proyek dari Tiongkok. Jurnal tersebut membahas mengenai prinsip yang akan digunakan dalam bernegosiasi dengan Tiongkok dalam kerja sama BRI.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Josep Lluís Mari Cervera	<i>The European Union approach to the One Belt One Road Initiative</i>	Untuk melaksanakan kerja sama dengan Tiongkok, Uni Eropa perlu untuk merumuskan beberapa rekomendasi dan menyesuaikan kerja sama yang sesuai dengan pasal perjanjian Uni Eropa.